

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Kuncoro (1997), Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang dalam masa pembangunan ekonomi. Pada mulanya upaya pembangunan negara sedang berkembang diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, atau populer disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Semula banyak yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan negara sedang berkembang adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi yang dihadapi negara sedang berkembang dapat terpecahkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang yaitu ketimpangan. Ketimpangan antar daerah tersebut dapat terjadi diakibatkan oleh karakteristik dan kondisi masing-masing daerah yang berbeda, seperti perbedaan kondisi sumber daya alam maupun manusianya, perbedaan keadaan geografis, serta perbedaan potensi keuangan. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan akan semakin memperparah ketimpangan daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang lebih luas dari konsep pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mengubah suatu perekonomian yang kurang maju, sangat tradisional dan berpendapatan rendah menjadi suatu perekonomian yang modern yang mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Pembangunan ekonomi hanya akan tercapai apabila pendapatan per kapita masyarakat terus menerus bertambah pada tingkat yang cukup cepat (Sukirno, 2013).

Sedangkan menurut Todaro dan Smith (2004), pembangunan ekonomi merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga

menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan kekayaan suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tujuan utama dari pembangunan suatu negara atau wilayah (Bhinadi, 2003).

Menurut Soubbotina dan Sheram (dalam Bhinadi, 2013), selain meningkatkan kekayaan suatu negara, pertumbuhan ekonomi juga berpotensi untuk menurunkan kemiskinan dan mengatasi permasalahan sosial lainnya. Meskipun sejarah juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kadang-kadang tidak diikuti oleh kemajuan di dalam pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara atau wilayah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Studi mengenai sumber pertumbuhan ekonomi dengan demikian menjadi penting untuk

memahami mengapa suatu wilayah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kenyataan umum hampir di semua negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah cukup besar. Hal ini dipicu oleh beberapa hal antara lain perbedaan potensi daerah yang besar, perbedaan kondisi demografis, ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Di samping itu kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional tersebut (Sjafrizal, 2014).

Penelitian mengenai ketimpangan di Indonesia sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Swastyardi (2008). Di dalam penelitian ini, Swastyardi menjabarkan mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan di Indonesia tahun 2001 hingga 2006 setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu bahwa di tahun 2001 hingga 2006 ketimpangan di tingkat nasional cenderung stabil dengan tren menurun. Di periode ini, yang mana merupakan periode pertama dari penerapan kebijakan desentralisasi fiskal, Indonesia mengalami *euphoria* terhadap desentralisasi yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah lebih efektif dibanding dengan sebelum desentralisasi fiskal diterapkan. Efek dari desentralisasi fiskal ini yaitu terjadinya penurunan tingkat ketimpangan. DAU memiliki tiga pengaruh terhadap ketimpangan di Indonesia. Pertama, meningkatnya DAU akan diikuti dengan menurunnya ketimpangan. Kondisi ini terjadi di tingkat nasional, Sumatra, dan daerah Jawa-Bali. Kedua, meningkatnya DAU akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan. Kondisi ini terjadi di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Ketiga, meningkatnya DAU akan diikuti dengan pola fluktuasi ketimpangan. Kejadian ini terjadi di daerah lainnya.

Dampak negatif dari ketimpangan yaitu inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004). Dampak negatif dari ketimpangan inilah yang menjadi masalah di dalam pembangunan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro dan Smith (2004), penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak negara. Ketimpangan daerah muncul akibat dari tidak meratanya pelaksanaan dalam pembangunan ekonomi, yang disebabkan karena perbedaan di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yaitu adanya daerah yang maju dan daerah yang kurang maju. Dalam menjelaskan indikator tingkat ketimpangan antar wilayah dapat

menggunakan *Williamson Index* yang ditemukan oleh Williamson (1965).

Berikut ini adalah angka Indeks Williamson di provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

**Tabel 1.1**

Indeks Williamson Provinsi-Provinsi di Indonesia  
Tahun 2012-2016

Provinsi	Indeks Williamson				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	0,0472	0,0549	0,0625	0,0701	0,0735
Sumatra Utara	0,0470	0,0551	0,0637	0,0698	0,0733
Sumatra Barat	0,0459	0,0503	0,0542	0,0570	0,0588
Riau	0,1644	0,1374	0,1138	0,0894	0,0748
Jambi	0,0088	0,0131	0,0165	0,0214	0,0246
Sumatra Selatan	0,0329	0,0403	0,0477	0,0534	0,0565
Bengkulu	0,0409	0,0433	0,0454	0,0471	0,0481
Lampung	0,0674	0,0726	0,0777	0,0811	0,0831
Kepulauan Babel	0,0081	0,0119	0,0157	0,0189	0,0212
Kepulauan Riau	0,0875	0,0796	0,0715	0,0651	0,0597
DKI Jakarta	0,5108	0,4778	0,4500	0,4322	0,4231
Jawa Barat	0,1464	0,1587	0,1727	0,1828	0,1877
Jawa Tengah	0,1484	0,1576	0,1661	0,1711	0,1738
DI Yogyakarta	0,0511	0,0543	0,0574	0,0596	0,0609
Jawa Timur	0,0625	0,0747	0,0860	0,0938	0,0972
Banten	0,0450	0,0530	0,0620	0,0687	0,0733
Bali	0,0293	0,0341	0,0372	0,0396	0,0406
NTB	0,0811	0,0845	0,0871	0,0812	0,0821
NTT	0,1009	0,1029	0,1051	0,1067	0,1078
Kalimantan Barat	0,0544	0,0584	0,0626	0,0657	0,0676
Kalimantan Tengah	0,0202	0,0236	0,0274	0,0296	0,0311
Kalimantan Selatan	0,0337	0,0388	0,0437	0,0480	0,0507
Kalimantan Timur	0,3178	0,3100	0,2728	0,2084	0,1877
Sulawesi Utara	0,0276	0,0303	0,0327	0,0343	0,0349
Sulawesi Tengah	0,0371	0,0383	0,0419	0,0384	0,0372
Sulawesi Selatan	0,0551	0,0491	0,0618	0,0635	0,0633
Sulawesi Tenggara	0,0266	0,0295	0,0329	0,0349	0,0362
Gorontalo	0,0349	0,0359	0,0369	0,0378	0,0382
Sulawesi Barat	0,0359	0,0374	0,0382	0,0390	0,0398
Maluku	0,0507	0,0523	0,0535	0,0547	0,0554
Maluku Utara	0,0368	0,0384	0,0401	0,0412	0,0420

Papua Barat	0,0327	0,0288	0,0238	0,0193	0,0162
Papua	0,0038	0,0006	0,0069	0,0091	0,0082

*Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2010-2016, diolah.*

Indeks Williamson sendiri dasar perhitungannya menggunakan PDRB per kapita beserta jumlah penduduk per daerah, sehingga indeks ini cocok digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan antar daerah. Angka yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson memiliki nilai maksimal 1, sehingga nilai yang mendekati angka 1 berarti bahwa daerah tersebut memiliki ketimpangan daerah yang tinggi.

Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki angka Indeks Williamson paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi DKI Jakarta menunjukkan angka Indeks Williamson pada tahun 2010 sebesar 0,585, tahun 2011 sebesar 0,532, tahun 2012 sebesar 0,510, tahun 2013 sebesar 0,477, tahun 2014 sebesar 0,45, tahun 2015 sebesar 0,433, dan tahun 2016 sebesar 0,423. Sedangkan daerah yang memiliki angka Indeks Williamson rata-rata terendah berada di Provinsi Papua. Pada tabel ditunjukkan bahwa Indeks Williamson di Provinsi Papua tahun 2010 sebesar 0,0400, tahun 2011 sebesar 0,0136, tahun 2012 sebesar 0,0038, tahun 2013 sebesar 0,0006, tahun 2014 sebesar 0,0069, tahun 2015 sebesar 0,0091, dan tahun 2016 sebesar 0,0082. Dapat dilihat dari perbandingan dua daerah tersebut bahwa ketimpangan yang terjadi sangat nyata, ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi sedangkan yang terjadi di Provinsi Papua sangat rendah, bahkan hampir tidak terdapat ketimpangan.

Berdasarkan fenomena tersebut ketimpangan daerah menjadi penting untuk dibahas karena keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi di negara atau daerah tersebut, akan tetapi juga dilihat dari mampukah pembangunan ekonomi tersebut untuk menurunkan tingkat ketimpangan daerah. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh atau keterkaitan antara ketimpangan daerah dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh faktor Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aglomerasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan daerah di Indonesia. Pada penelitian sebelumnya, variabel Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dilakukan pada lingkup provinsi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan daerah. Akan tetapi pada penelitian ini variabel tersebut tetap digunakan untuk melihat dampaknya terhadap ketimpangan daerah secara luas atau dalam hal ini adalah dalam lingkup nasional. Oleh karena itu penelitian ini berjudul *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Daerah di Indonesia tahun 2010-2016”*.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan membahas ketimpangan daerah tiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Mengingat Provinsi



Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran baru yang dimekarkan tahun 2012, sehingga terdapat banyak keterbatasan data. Maka dari itu penulis tidak menyertakan Provinsi Kalimantan Utara dalam penelitian ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016?
4. Bagaimana pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016.
5. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan daerah di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2016.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian yang akan dibuat ini, diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disamping itu guna mendapatkan ilmu pengetahuan serta penulis dapat mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah.
2. Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Indonesia sehingga terdapat adanya pembangunan yang merata di tiap daerah di Indonesia.
3. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumbangan pikiran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketimpangan daerah.